

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



Oleh:

ANDRY TRISAPUTRA

2008/05317

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada SKPD Provinsi Sumatera Barat)

Andry Trisaputra
05317/2008

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Juli 2013

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)

Andry Trisaputra

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : andry.trisaputra@gmail.com

ABSTRACT

This study intended to determine: (1) The effect of information technology utilization on the performance of local governments timeliness of financial reporting, (2) financial supervision of the local government financial reporting timeliness.

Type of this research is causative. The population in this case were all employees of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) West Sumatra provincial government. Technique of sampling is a sampling method and obtained a total 38 SKPD. Type of data used is the data subject and the data source used is primary data. Data collection method used is by using questionnaires. The analysis used is multiple regression analysis.

The study concluded that: (1) information technology and the area of financial supervision has a positive significant effect on local government financial reporting timeliness.

The research concludes that : (1) The selection of the research is done only in one place. (2) This study is a survey method using questionnaires without features an interview or oral questions.

Suggestions in this study were: (1) For government agencies are expected to be able to improve their performance in local financial management with increasing attention and optimum utilization of information technology, the adequate supervision of local finance expected particular area finance manager is able to carry out the duties of accounting and accounting functions well that eventually produce the local government financial reports timely and useful so that it can be used in decision-making, (2) Utilization of information technology in order to be effective, the equipment should be worn / damaged in the data as soon as possible.

Key words: *Timeliness on local government financial reporting, effect of information technology, regional financial supervision*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, (2) Pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling* dan diperoleh 38 SKPD. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Pemilihan penelitian ini dilakukan hanya di satu tempat. (2) Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya pengawasan keuangan daerah yang memadai diharapkan bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik. (2) Agar pemanfaatan teknologi informasi dapat terlaksana dengan efektif, sebaiknya peralatan yang usang/rusak di data secepat mungkin.

Kata Kunci: Ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* serta ketepatan waktu atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang relevan apabila terdapat (1) manfaat umpan balik (*feedback value*), (2) manfaat prediktif (*predictive value*), (3) tepat waktu (*timeliness*), dan (4) lengkap.

Ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau pengguna. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka (Amey, Gordon dan Narayanan) dalam Respati (2001).

Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut SFAC No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yang juga terdapat dalam Hendriksen dan Breda (1992), harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan.

Hal pertama yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Jogiyanto (1995) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatan waktu) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (1995) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto 2001:89).

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003).

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Yosa, 2010 dalam Arfianti, 2011)

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Adapun fenomena yang terjadi di beberapa SKPD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010, berdasarkan laporan dari DPKD sebagai Dinas yang mengelola keuangan Sumatera Barat ditemukan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, seperti keterlambatan penyampaian daftar uang yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap SKPD yang seharusnya dicatat pada tahun 2010 tetapi dimasukkan pada periode tahun anggaran 2011. Sehingga laporan keuangan pada tahun 2010 tidak sesuai dengan SAP. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang

menyatakan bahwa laporan keuangan yang relevan harus tepat waktu..

Penelitian Arfianti (2011) tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum” (Studi Pada BLU Di Kota Semarang). Variabel independen yang digunakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan.

Harifan (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Dengan variabel independen antara lain Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi, sedangkan variabel dependen adalah Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh

positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan ketepatanwaktuan dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus tepat waktu sehingga bermanfaat bagi para pemakai. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria tepat waktu. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat sebuah skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Sumatera Barat)**”.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah;

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

2. Sejauhmana pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.
2. Bagi dinas pemerintah dan pemerintah daerah yang diteliti dapat memberikan masukan untuk mempertimbangkan penerapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah guna menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.
3. Akademisi, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Ketepatanwaktuan

Menurut IAI (2002) dalam Catrinasari (2006) bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketepatanwaktuan menunjukan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekwensi informasi pelaporan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan bukan hanya dibutuhkan oleh organisasi sektor publik saja, tetapi organisasi non sektor publik juga

membutuhkan hal yang sama yaitu ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Menurut Respati (2001) Ketepatanwaktuan menunjukan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Sehingga dapat mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan.

Mamduh (2003) ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus di perhatikan oleh perusahaan. Apabila penyelesaian penyajian laporan keuangan terlambat atau tidak diperoleh saat di butuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan akan berkurang.

Menurut Jogiyanto (1995) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (1995) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto 2001).

Oleh karena itu ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau pengguna. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu

akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka (Amey, Gordon dan Narayanan) dalam Respati (2001).

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Ketepatan waktu informasi akuntansi menurut SFAC No. 2 mengenai karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yang juga terdapat dalam Hendriksen dan Breda (1992), harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau pengguna.

Chamber dan Penman (1984) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara :

1. Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan
2. Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

Schwartz dan Soo (1996), mengukur keterlambatan pelaporan didasarkan pada kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan pelaporan informasi keuangan yang

ditetapkan oleh *Stock Exchange Commission* (SEC). Sedangkan Na'im (1999) dan Bandi dan Hananto (2002) ketepatan waktu dilihat dari keterlambatan pelaporan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Komponen Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010) :

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer se-bagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu me-lakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi.

Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin di-kumpulkan dengan

peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak.

Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011):

- 1) pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
- 2) keakurasian dalam perhitungan dan perbandingan lebih besar,
- 3) kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
- 4) penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu,
- 5) tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
- 6) pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas/banyak, dan
- 7) produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

b. Tingkat Integrasi Teknologi Informasi

Integrasi adalah merupakan suatu upaya untuk melakukan penggabungan dua atau lebih elemen guna menghasilkan inovasi baru. Dengan kata lain bahwa mengintegrasikan teknologi informasi adalah suatu upaya untuk menggabungkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas dengan menggunakan strategi baru (Yaumi, 2011). Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

- 1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
- 3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
- 4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
- 5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
- 7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
- 8) Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya

Pengawasan Keuangan Daerah

a) Pengertian

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian ke-uangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara dimana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban-an daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah.

Menurut Yosa (2010) dalam Arfianti (2011) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang di-perlukan

untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.

b) Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*).

c) Pengawasan Keuangan Daerah

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada

setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh ke-kuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

d. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Yani (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya :

- 1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- 3) Struktur APBD,
- 4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
- 5) Penyusunan dan penetapan APBD,
- 6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- 7) Penatausahaan keuangan daerah,
- 8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,

- 9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- 10) Pengelolaan kas umum negara,
- 11) Pengelolaan piutang daerah,
- 12) Pengelolaan investasi daerah,
- 13) Pengelolaan barang milik negara,
- 14) Pengelolaandana cadangan,
- 15) Pengelolaan utang daerah,
- 16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
- 17) Penyelesaian kerugian daerah,
- 18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Terdahulu

Arfianti (2011) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum” (Studi Pada Blu Di Kota Semarang). Variabel independen yang digunakankualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Wiwik (2010) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris pada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

Widia (2012) meneliti tentang faktor faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar (survei pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kampar). Data pada penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuisisioner yang disebarkan langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 108 responden yang bekerja pada bagian keuangan / tata usaha pada satuan kerja perangkat daerah di Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Hubungan Antar Variabel

1 Hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Jogiyanto (1995) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (1995:18) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan

lebih efektif. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto 2001).

Selain itu, manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003).

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Fikri (2011) yang meneliti tentang pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada instansi pemerintah kota padang. Populasi penelitian ini berjumlah 42 SKPD dengan *judgement sampling* dan responden berjumlah 42 kepala bagian akuntansi. Alat analisis yaitu analisis jalur. Yang menjadi variabel intervening dalam penelitian ini adalah SIKD. hasil penelitian SIKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. dan, pengawasan keuangan daerah

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda melalui SIKD.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatanwaktuan.

2 Hubungan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian Fikri (2011) yang meneliti tentang pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada instansi pemerintah kota padang. Populasi penelitian ini berjumlah 42 SKPD dengan *judgement sampling* dan responden berjumlah 42 kepala bagian akuntansi. Alat analisis yaitu analisis jalur. Yang menjadi variabel intervening dalam penelitian ini adalah SIKD. hasil penelitian SIKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. dan, pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemda melalui SIKD.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Kerangka Konseptual

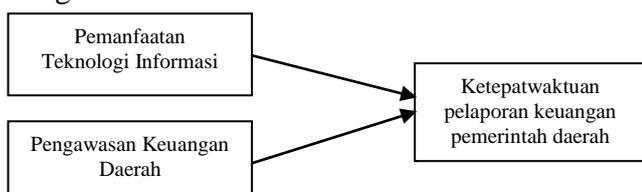
Ketepatanwaktuan adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk menjamin tersedia informasi ditangan pemakai atau

pengguna. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai.

Hal pertama yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Hubungan antar Variabel Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ :Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan pemerintah keuangan daerah
- H₂ :Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan pemerintah keuangan daerah

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen. Dalam hal ini melihat seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPKD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 38 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor dan Inspektorat.

Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pejabat penata usaha keuangan dan staf akuntansi pada SKPD. Alasan pemilihan responden adalah karena pejabat penata usaha keuangan dan staf akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat

memahami kegiatan akuntansi. Maka, jumlah responden 38 SKPD x 3 orang = 114 Responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data berupa tanggapan tertulis atas pertanyaan atau kuesioner dari subjek penelitian pada instansi pemerintah daerah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut di-peroleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

Menurut Sekaran (2006:61), data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.

Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini. Kuesioner diberikan secara langsung ke alamat responden. Pengembalian kuesioner dijemput langsung ke instansi pemerintah sesuai kesepakatan pengembalian.

Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (Y).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Variabel Bebas (X).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah.

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban dan masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Menurut Sugiyono (2008:133) dengan skala likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan dapat dilihat dari:

1. Informasi segera tersedia ketika dibutuhkan.
2. Laporan-laporan seperti : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan sering disediakan secara sistematis dan teratur.
3. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Untuk pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari:

1. *Software* aplikasi
2. Proses akuntansi secara komputerisasi
3. *Software* sesuai peraturan perundangan
4. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
5. Pemeliharaan peralatan
6. Perbaikan peralatan yang rusak/usang

Untuk pengawasan keuangan daerah dilihat dari:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. APBD.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Sebelum dibagikan kuesioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*), yang dilakukan pada 30 orang mahasiswa di fakultas ekonomi akuntansi. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *corrected item-total correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $n=30$ adalah 0,361.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (handal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Untuk uji reliabilitas digunakan pengujian *croanbach alpha* menurut Sekaran (2005), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kurang dari 0,6 tidak reliable
- b. 0,6 – 0,7 dapat diterima
- c. 0,7 – 0,8 baik
- d. Lebih dari 0,8 reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat nilai signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) dan toleransi. Jika $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas tapi jika $VIF > 10$ dan $tolerance > 0,1$ berarti terjadi multikolinieritas.

3. Uji heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *glejser*. Dalam uji ini, apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, model yang baik ialah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah proses pengolahan data yang telah didapat dari responden. Data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden, (b) menghitung nilai jawaban yang dilakukan dengan cara: menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan, menghitung rata-rata skor item, menghitung nilai rerata jawaban responden, menghitung nilai Tingkat Capai Responden (TCR) dari masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, Lalu nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut:

- Interval jawaban responden 76-100% kategori jawaban baik.
- Interval jawaban responden 56-75% kategori jawaban cukup baik.
- Interval jawaban responden $< 56\%$ kategori jawaban kurang baik.

2. Metode Analisis

a. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *adjusted R square*-nya, pemilihan nilai *adjusted R square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan jumlah variabel lebih dari satu. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *Adjusted R²*. Untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhitungkan banyaknya variabel X

Kalau $k > 1$ maka $adjusted R^2 < R^2$, yang berarti bahwa apabila banyaknya variabel bebas ditambah, *adjusted R²* dan R^2 akan sama-sama meningkat, tetapi peningkatan *adjusted R²* lebih kecil dari pada R^2 .

Adjusted R² dapat positif atau negatif, walaupun R^2 selalu non negatif. Jika *adjusted R²* negatif nilainya dianggap 0.

b. Persamaan Regresi Berganda

Dari data yang telah dikumpulkan, maka akan diolah dengan menggunakan alat analisa regresi berganda (*Multiple Reggression*) dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Alat analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan:

Y = Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

A = Konstanta

$b_1b_2b_3b_4b_5$ = Koefisien regresi variabel independen

x_1 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

x_2 = Pengawasan Keuangan Daerah

e = error

c. Uji F (*F-Test*)

Uji F dilakukan bertujuan untuk menguji apakah hasil analisis jalur modelnya sudah *fit* atau belum dan untuk dapat mengetahui pengaruh antara variabel endogen dan variabel eksogen secara keseluruhan atau secara simultan. Patokan yang digunakan dalam pengujian ini adalah membandingkan nilai *sig* yang diperoleh dengan derajat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Apabila nilai *sig* yang diperoleh lebih kecil dari derajat signifikansi maka model yang digunakan sudah *fit*.

d. Uji Hipotesis (*t-Test*)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat nilai signifikan masing-masing parameter yang diestimasi, maka digunakan *t-Test*.

Dengan kriteria pengujian :

- a. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) positif dan jika $t_{hit} > t_{tabel}$ maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1, 2 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima H_a pada hipotesis 1 dan 2
- b. Jika tingkat signifikansi $< \alpha = 0,05$, $t_{hit} > t_{tabel}$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis
- c. Jika tingkat signifikansi $> \alpha = 0,05$ dan $t_{hit} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis

Selain kriteria tersebut, untuk melihat ada tidaknya pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan melihat tingkat signifikansi dan koefisien positif dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi $> 0,05$ berarti H_a ditolak dan H_0 diterima.

Definisi Operasional

1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software, database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang di-tujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif

dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian

Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N=93$, adalah 0,206.

Untuk instrumen ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,598. Instrumen pemanfaatan teknologi informasi nilai terkecil 0,297 dan untuk instrumen pengawasan keuangan daerah dengan nilai terkecil sebesar 0,361.

Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006).

Untuk instrumen pemanfaatan teknologi informasi 0,763 dan untuk instrumen pengawasan keuangan daerah 0,847. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran bisa diterima atau baik. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual (R^2)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

Hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 1,026 dengan signifikan 0,243. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian

dinyatakan berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* di atas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil nilai VIF yang diperoleh menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada di atas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

Berdasarkan Tabel, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

Hasil Penelitian

1. Model Estimasi Regresi

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS 16.

Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat nilai *sig* sebesar $0,006 < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Pada Tabel 20 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut :

$$\text{KPKD} = 3,829 + 0,100 \text{ PTI} + 0,163 \text{ PKD}$$

Dimana :

KPKPD = Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

PKD = Pengawasan Keuangan Daerah

Dari persamaan diatas dapat dilihat bahwa terdapat nilai konstanta sebesar 3,829 yang berarti bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berada pada 3,829 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_1 adalah sebesar 0,100 ini berarti bahwa dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi satu satuan, maka akan meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,100 satuan dan bentuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah positif. Nilai koefisien X_2 adalah sebesar 0,163 ini berarti bahwa dengan meningkatnya pengawasan keuangan daerah satu satuan maka akan meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,163 satuan dan bentuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah positif.

2. Uji Model

a) Uji F (*F test*)

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan merupakan model tetap dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} atau membandingkan antara nilai *sig* dan $\alpha=0,05$. Nilai F_{tabel} untuk $n=93$ pada $\alpha=0,05$ adalah 3,09. Nilai F_{hitung} adalah 11,161 sedangkan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian, $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah *fix*.

b) Koefisien Determinasi (Nilai *Adjusted R Square*)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat.

Berdasarkan hasil *output* diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,181 atau 18,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel bebas (pemanfaatan teknologi

informasi dan pengawasan keuangan daerah) mampu menjelaskan 18,1% variasi variabel terikat (ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah), sedangkan sisanya sebesar 81,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

c) Uji T-test

Uji t statistik (*t-test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 93-2-1 = 92$ adalah 1,662.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 20, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini :

1) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,019 > t_{tabel} 1,662$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,100. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 diterima. Dimana semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2) Pengawasan Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,001 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,142 > t_{tabel} 1,662$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,163. Jadi hipotesis yang telah

dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_2 diterima. Dimana semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan pengawasan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Winidyaningrum (2010) tentang "Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)". Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian di atas konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Jogiyanto (1995) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (1995) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga

mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi di mana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel tersebut berada pada kategori baik sehingga pemanfaatan teknologi informasi dengan semakin baik, maka akan membantu pegawai untuk mencapai ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah yang semakin meningkat. Dengan mengetahui pemanfaatan teknologi informasi tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah yang semakin baik, keterlibatan individu dalam pemanfaatan teknologi akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh laporan keuangan tersebut, serta bagaimana akan mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target laporan keuangan yang disusun akan sesuai.

Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai TCR terendah yaitu 73,12% yang berarti peralatan yang usang/rusak tidak di data tepat pada waktunya masih dikategorikan cukup baik. Nilai rerata pemanfaatan teknologi informasi dikategorikan baik dengan nilai TCR 82,45%. Dapat dikatakan pemanfaatan teknologi informasi SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dikategorikan baik dan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD) akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hipotesis kedua penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh antara pengawasan keuangan daerah dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah bahwa semakin baik pengawasan

keuangan daerah maka ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah juga akan tercapai.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian diatas konsisten dengan Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) yang menyatakan bahwa bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pengawasan yang dilakukan akan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pengawasan keuangan daerah di mana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel tersebut berada pada kategori baik sehingga pengawasan keuangan daerah dengan semakin baik, maka akan membantu pegawai untuk mencapai laporan keuangan yang tepat waktu. Dengan mengetahui pengawasan keuangan daerah, tingkat pelaporan keuangan yang semakin baik. Instansi mampu menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu, sehingga pelaporan keuangan daerah menjadi baik.

Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai TCR terendah yaitu 77,63% yang berarti pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pejabat yang benar-benar mengerti tentang keuangan daerah masih dikategorikan baik. Nilai rerata pengawasan keuangan daerah dikategorikan baik dengan nilai TCR sebesar 83,01%. Dapat dikatakan pengawasan keuangan daerah dikategorikan baik dan berpengaruh signifikan

positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin baik pengawasan keuangan daerah dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD) maka akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat . Dimana semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengawasan keuangan daerah signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat . Dimana semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pemilihan penelitian ini dilakukan hanya di satu tempat yakni di SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan hanya dilakukan di satu provinsi, maka perlu disadari bahwa metode ini berakibat pada lemahnya validitas eksternal atau kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian ini.
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak :

1. Bagi instansi pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, dan adanya pengawasan keuangan daerah yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu dan bermanfaat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
2. Agar pemanfaatan teknologi informasi dapat terlaksana dengan efektif, sebaiknya peralatan yang usang/rusak di data secepat mungkin. Sehingga kegiatan pembuatan laporan keuangan tidak terganggu oleh peralatan yang rusak tersebut. Maka laporan keuangan SKPD dapat dihasilkan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*.
- Anggraini, Devi. 2002. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah. Padang: *Skripsi* Program S1, Universitas Negeri Padang (Tidak Dipublikasikan)
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.

Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro

Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, Padang. *Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang (Tidak Dipublikasikan)*

Indriasari, Desi. 2008. “ Pengaruh Kapasitas sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah”. *Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak*

Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta :BPFE UGM.

Jogiyanto, HM. 1995. *Analisa dan Desain Sistem Informasi :Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Offest. Yogyakarta

Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002 .”Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas, Teknologi dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kinerja Akuntan Publik”.*Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No.2

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mahmudi. 1997. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Terakayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN

Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Informasi Keuangan Daerah.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

-----, Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi :Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisa , Desain, dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi* .Jakarta : Erlangga.

Zetra, Aidinil. 2009. Strategi Pengembangan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAMPIRAN

1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	93	8	15	12.56	1.868
X1	93	23	40	32.98	3.848
X2	93	22	40	33.20	3.688
Valid N (listwise)	93				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67185082
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.061
	Negative	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		1.026
Asymp. Sig. (2-tailed)		.243
a. Test distribution is Normal.		

b. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.847	1.180
	X2	.847	1.180

a. Dependent Variable: y

c. Uji heterokedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.548	1.273		.430	.668
	X1	.032	.034	.107	.935	.352
	X2	-.012	.035	-.037	-.325	.746

a. Dependent Variable: AbsUt

3. Hasil Analisis Data

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.446 ^a	.199	.181	1.690

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Persamaan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.829	1.866		2.051	.043
	X1	.100	.050	.207	2.019	.046
	X2	.163	.052	.322	3.142	.002

a. Dependent Variable: y

c. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.777	2	31.888	11.161	.000 ^a
	Residual	257.148	90	2.857		
	Total	320.925	92			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: y